

# **Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik Kota Semarang**

**Oleh :**

**Cahyo Uji Purnanto, Margareta Suryaningsih, Kismartini**

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

A cluster of batik is an association of micro, small and medium enterprises batik, the problems of the same kind that has formed by a city government semarang through the agency of planning and development of the city of semarang. Then the government of semarang giving authority to the department of cooperatives, micro business small and medium enterprises, the city of semarang to do program msmb, in accordance with the articles which are handed down by the city of semarang budget. The process of the implementation of umkm, cluster batik is good because it has in accordance with act number 20 year 2008 and the result of the implementation of umkm, cluster batik not good because there are several factors impediment to implementation of that are not routine, as control a cluster of batik's human resources dominated by the old people, facilities and infrastructure to inadequate. Then, during a function of the research the researchers found another phenomenon affecting the implementation of empowerment namely a communication that is not so good. In addition, there is a factor supporting the implementation of empowerment namely contribution, our commitment readiness, competence, financial institutions dept. of cooperatives, director of semarang city and umkm, social relationships and the degree of engagement a member of a cluster of have been good.

Keyword : the process of implementation, by factors in support, a factor of the economy, the result of implementation, ' s human resources and environmental conditions.

## **ABSTRAKSI**

Klaster batik merupakan perkumpulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) batik yang memiliki permasalahan-permasalahan sejenis yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang. Kemudian Pemerintah Kota Semarang memberikan wewenang kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Semarang untuk melakukan program pemberdayaan UMKM sesuai dengan anggaran yang diturunkan oleh APBD Kota Semarang. Proses implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik sudah baik karena telah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 dan hasil implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik belum baik karena terdapat beberapa faktor penghambat implementasi seperti kontrol yang tidak rutin, sumberdaya manusia klaster batik didominasi oleh orang-orang tua, sarana dan prasarana belum memadai. Selain itu, terdapat faktor pendukung implementasi pemberdayaan yaitu kontribusi, komitmen, kesiapan, kompetensi, finansial instansi

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, hubungan sosial dan derajat keterlibatan anggota klaster sudah baik.

Keyword : Proses implementasi, faktor pendukung, faktor penghambat, hasil implementasi, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Saat ini sektor Industri Pengolahan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam kontribusinya terhadap PDB. Padahal awalnya sektor pertanian penyumbang terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) namun secara bertahap kontribusinya tergantikan oleh industri pengolahan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan industri pengolahan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik sektor tradisional maupun modern. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Maka untuk memperkuat perekonomian nasional, diperlukan pembinaan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan secara rutin salah satunya adalah usaha mikro batik Kota Semarang karena batik merupakan budaya bangsa yang telah diakui oleh dunia sehingga memiliki peluang pasar yang luas. Pemberdayaan UMKM sangat penting dalam menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah : *Pertama*, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. *Kedua*, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. *Ketiga*, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. *Keempat*, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). *Kelima*, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. *Keenam*, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. Dilihat dari aspek tersebut maka peneliti ingin melihat implementasi program usaha mikro batik dengan judul penelitian **Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Dalam Lingkup Klaster Batik di Kota Semarang.**

## B. TUJUAN

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

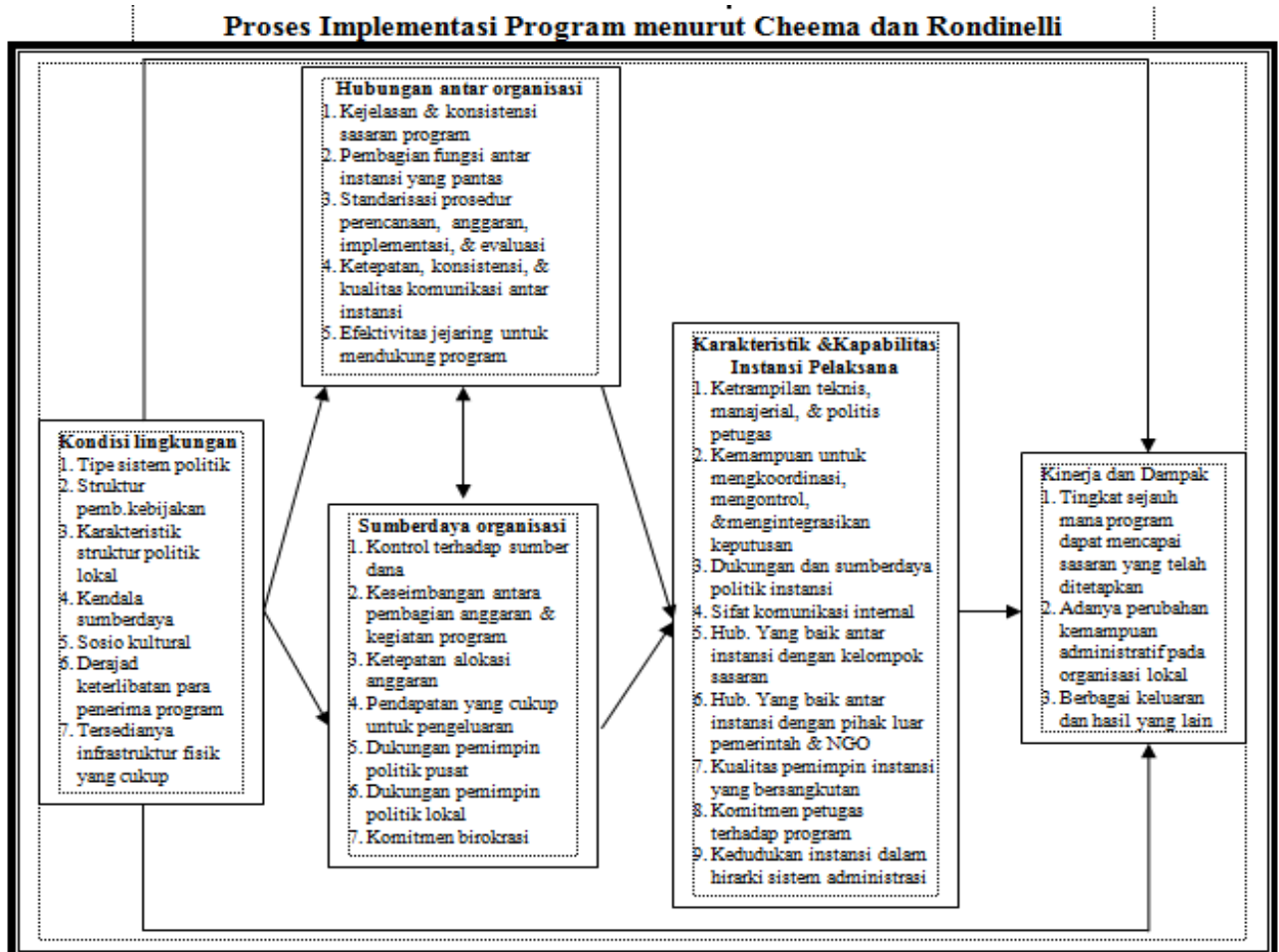
1. Untuk mengetahui implementasi program usaha mikro batik dalam lingkup kluster batik di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program usaha mikro batik dalam lingkup kluster batik di Kota Semarang.

## C. TEORI

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan usaha untuk melaksanakan suatu program atau kebijakan, mengadministrasikan, maupun usaha memberikan dampak tertentu pada program tersebut dimasyarakat. Winarno (2002:101) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan, pada sisi yang lain implementasi merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Pengukuran implementasi kebijakan publik dalam melihat proses dan hasil dari program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup kluster batik Kota Semarang menggunakan variabel sumberdaya dalam model implementasi George C. Edwards III (1980) dan variabel kondisi lingkungan dalam model implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983), sebagaimana dapat dilihat pada gambar :

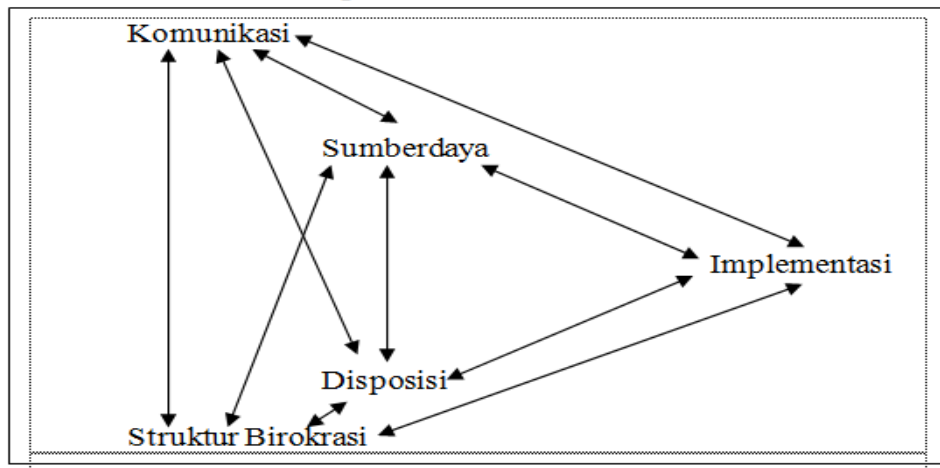
Gambar 1



Sumber: Rondinelli dan Cheema dalam Subarsono (2006: 102)

Didalam variabel kondisi lingkungan menurut model Cheema dan Rondinelli, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses dan hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kota Semarang, yaitu tipe sistem politik, struktur pembuat kebijakan, karakteristik struktur politik lokal, kendala sumberdaya, sosio kultural, derajat keterlibatan para penerima program, tersedianya infrastruktur fisik yang cukup. Semua indikator ini saling keterkaitan dan berhubungan dalam melihat proses dan hasil dari implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik Kota Semarang.

**Gambar 2**  
**Faktor Penentu Implementasi Menurut Edwards III**



Sumber: Edwards III dalam Subarsono (2006: 91)

Didalam variabel sumberdaya menurut model Edwards, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana proses dan hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik Kota Semarang, yaitu kontribusi instansi, komitmen instansi, kesiapan instansi, kompetensi instansi, finansial pemerintah, kontrol pemerintah, ketepatan dan kesiapan sasaran.

#### **D. METODE**

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian interpretivisme atau pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian yang dipilih menggunakan tipe penelitian deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang fokus penelitian yaitu implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik di Kota Semarang.

Fokus penelitian ini adalah implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik di Kota Semarang. Didalam melakukan penelitian mengenai implementasi program usaha mikro batik peneliti mengambil situs penelitian di Kota Semarang karena para pengusaha batik tersebar diseluruh Kota Semarang. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sample*, artinya pengambilan dengan sengaja didalam klaster batik untuk memperoleh *key informan* yaitu orang-orang yang mengetahui dengan benar atau yang terpercaya sedangkan untuk memperoleh data kualitatif, tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan teknik *snowballing* dimana pertama peneliti menentukan satu orang untuk dijadikan informan, kemudian selanjutnya orang tersebut yang akan menunjuk orang lain untuk kita jadikan informan, baik didalam lingkup klaster batik maupun diluar lingkup klaster batik. Begitu seterusnya,

sampai data atau informasi yang diperoleh dirasa sudah cukup oleh peneliti. Subyek penelitian yang dimaksud peneliti disini adalah anggota-anggota klaster batik yang ada di Kota Semarang dan dinas-dinas yang terkait dalam program usaha mikro klaster batik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka :

1. Proses implementasi program pemberdayaan UMKM klaster batik di Kota Semarang sudah baik, karena :
  - a. Program pemberdayaan UMKM telah sesuai dan berpedoman pada Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Program pemberdayaan telah sesuai karena dalam membuat dan menjalankan program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM telah berpedoman pada pasal 7 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang beberapa aspek berikut :
    1. Pendanaan.
    2. Sarana dan prasarana.
    3. Informasi usaha.
    4. Kemitraan.
    5. Perizinan usaha.
    6. Kesempatan berusaha.
    7. Promosi dagang.
    8. Dukungan kelembagaan.

Dinas koperasi dan UMKM Kota Semarang belum secara maksimal medalami substansi pasal 7 Undang-undang nomor 20 tahun 2008 namun program-program yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah sesuai dengan pasal tersebut.

- b. Sumber pendanaan telah sesuai dengan peraturan Pemerintah Kota Semarang tentang APBD yaitu Perda no 1 tahun 2013, Peraturan Walikota no 2 tahun 2013 tentang APBD, Perda no 12 tahun 2013 tentang APBD tahun anggaran 2014 dan Peraturan Walikota no 41 tahun 2013 tentang penjelasan APBD 2014.
      - c. Pembuatan program pemberdayaan UMKM klaster batik sesuai dengan anggaran yang didapatkan dari APBD untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
      - d. Menurut beberapa narasumber implementasi program pemberdayaan UMKM klaster batik sudah sering dilakukan dan sesuai dengan tata tertib karena tidak pernah muncul permasalahan-permasalahan yang sangat fatal.
      - e. Namun sistem kontrol yang masih kurang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia.
2. Hasil implementasi pemberdayaan UMKM klaster batik di Kota Semarang belum baik, karena :
  - a. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang belum dapat menjalin kerjasama kelembagaan dengan instansi-instansi tertentu untuk membantu permasalahan pendanaan. Selama ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang masih mengandalkan dana dari APBD, padahal

setiap tahunnya dana APBD belum mencukupi untuk memenuhi program pemberdayaan UMKM klaster batik.

- b. Keterbatasan sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang mengakibatkan tidak adanya sistem kontrol yang rutin setelah dilakukan program pemberdayaan. Alhasil tidak adanya data statistik perkembangan UMKM klaster batik setelah mengikuti program pemberdayaan pada setiap tahunnya.
- c. Bahan baku yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang memiliki harga masih terlalu tinggi sehingga UMKM klaster batik lebih memilih untuk membeli bahan baku dari luar Kota Semarang.
- d. Masih terdapat beberapa anggota-anggota klaster batik yang belum pernah mendapatkan program pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana berupa pertokoan untuk memasarkan batik hasil perajin.
- f. Kurangnya sarana promosi untuk memperkenalkan batik khas Semarang kepada masyarakat dan wisatawan luar Kota Semarang.

## **B. ANALISIS**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik Kota Semarang dilihat dari dua fenomena, yaitu proses dan hasil. Proses dan hasil dari implementasi program usaha mikro batik dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan usaha mikro Klaster Batik Kota Semarang yang dilihat dari sumberdaya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, yaitu :
  - a. Kontribusi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah baik karena ketika melaksanakan program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tidak memungut biaya sama sekali.
  - b. Komitmen Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah baik karena rela meninggalkan pekerjaan kantor untuk menjalankan program pemberdayaan.
  - c. Kesiapan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah baik dapat dilihat dengan adanya rutinitas program yang dijalankan.
  - d. Kompetensi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sudah baik karena Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang selalu mengadakan kerjasama untuk mendatangkan pengisi materi yang profesional dalam program pemberdayaan UMKM klaster batik.
  - e. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah membagi anggaran APBD dengan adil kedalam beberapa program pemberdayaan namun beberapa program masih kekurangan dana.
2. Faktor-faktor Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan UMKM Klaster Batik Kota Semarang yang dilihat dari kondisi lingkungan, yaitu :
  - a. Hubungan sosial antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang tidak terjadi permasalahan.
  - b. Derajat keterlibatan anggota-anggota klaster dalam pelatihan sangat antusias.
3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Kota Semarang yang dilihat dari sumberdaya manusia Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, yaitu :

- a. Kontrol yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang masih sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang.
  - b. Anggota-anggota klaster didominasi oleh orang-orang tua sehingga mengalami sedikit kendala dalam menerima program dan orang tua sering membawa anaknya ketika sedang mengikuti pelatihan sehingga kurang fokus.
4. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro Batik Kota Semarang yang dilihat dari kondisi lingkungan, yaitu :
- a. Masih terdapat beberapa anggota-anggota klaster batik yang belum pernah mendapatkan program pemberdayaan padahal selain Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang seperti Disperindag dan Disnaker pun melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Artinya kurang adanya komunikasi dalam sistem politik pemerintah.
  - b. Kendala sumberdaya masih belum terselesaikan seperti ketersediaan bahan baku dengan harga murah, informasi pelatihan yang belum tersampaikan kepada seluruh anggota klaster batik.
  - c. Infrastruktur fisik klaster batik masih kurang seperti sarana tempat pemasaran produk dan promosi produk.

## **PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Proses implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik Kota Semarang sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 namun belum mendalami keseluruhan substansi dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 karena dalam mengimplementasikan program masih mengalami banyak kekurangan yang sebenarnya sudah tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2008 seperti perluasan pendanaan bukan bank. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang belum mampu menjalankan program dengan baik yang sesuai dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2008 karena masih banyak anggota-anggota klaster yang belum mendapatkan pelatihan. Hasil implementasi program pemberdayaan usaha mikro batik dalam lingkup klaster batik Kota Semarang belum baik karena masih banyak kendala-kendala yang belum dapat diselesaikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang seperti perluasan pemasaran, perluasan pendanaan, ketersediaan bahan baku yang terbatas dan sulit didapatkan, harga bahan baku yang tinggi, alat-alat yang kurang memadai dan sarana atau tempat promosi yang belum tersedia.

### **B. REKOMENDASI**

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti memberikan saran atau rekomendasi, antara lain :

1. Menjalin Hubungan (*Networking*)

UMKM klaster batik di Kota Semarang masih memiliki beberapa permasalahan yang cukup penting diantaranya sumber dana, bahan baku, dan sarana pemasaran. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang harus mampu menjalin hubungan baik dengan pengusaha-pengusaha besar untuk mendapatkan bantuan dana. Selain pengusaha besar bisa menjadi investor, pengusaha besar juga dapat memperluas pemasaran karena pengusaha besar telah menggunakan sistem bisnis jaringan sehingga sangat kuat dalam aspek pemasaran dan telah memiliki pasar yang

luas. Jika terjalin hubungan yang baik permasalahan yang dialami UMKM dapat terselesaikan dengan baik karena investor berbeda dengan bank. Jika UMKM mengambil pinjaman ke bank maka perlu memenuhi beberapa ketentuan dan wajib kredit (membayar) namun investor tidak seperti itu. Investor hanya menerapkan konsep bagi hasil jadi akan lebih menguntungkan dan bisa mengembangkan usaha tanpa modal atau pinjaman.

#### 2. Mendidik Tenaga Terampil (Mentor)

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang sangat keterbatasan sumberdaya manusia sehingga mengalami kesulitan dalam sistem pengontrolan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang dapat mendidik seseorang untuk menjadi tenaga terampil (mentor) yang khusus mendampingi UMKM klaster batik untuk berkembang. Tenaga terampil akan fokus pada pemberdayaan UMKM klaster batik karena tidak terikat dengan pekerjaan-pekerjaan kantor. Dengan demikian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang akan mudah dalam sistem kontrol terhadap UMKM klaster batik. Tenaga terampil akan bertugas layaknya seorang guru yang mendidik dan mengarahkan muridnya (UMKM klaster batik).

#### 3. *Time Management*

Anggota-anggota klaster didominasi oleh orang-orang tua sehingga biasanya dalam program pemberdayaan mengajak anak-anaknya. Dengan demikian peserta pelatihan akan tidak fokus karena ikut mengawasi anak-anaknya. Salah satu solusinya adalah mengatur jadwal pelatihan yang tepat agar peserta pelatihan tidak membawa anak-anak. Jadwal pelatihan dapat dilakukan pada hari libur karena rata-rata ketika hari libur semua pekerjaan ikut libur sehingga anak-anak dapat tinggal atau bermain dengan ayah atau ibunya yang tidak mengikuti pelatihan UMKM klaster batik.

#### 4. Sistem Kontrol (Pendataan)

Sistem kontrol (pendataan) berarti teknik statistik yang dilakukan pada waktu akan, sedang atau telah melakukan pemberdayaan UMKM klaster batik. Sistem kontrol ini sangat bermanfaat untuk mendata peserta pelatihan yang telah ikut dan yang belum pernah ikut. Biasanya dalam melakukan kegiatan jarang dilakukan sistem kontrol yang rutin karena pengontrolan biasanya dilakukan setelah semua kegiatan selesai, seharusnya setiap waktu. Jika tidak dilakukan sistem kontrol yang rutin maka kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang akan tidak efektif, efisien dan berdampak pada anggota-anggota klaster batik yang belum mendapatkan pelatihan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Nugroho, Riant. (2012). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komtindo.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.